

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu lingkungan hidup belakangan menjadi topik yang kerap dibahas oleh masyarakat. Tak terkecuali media massa yang memberikan ruang bagi isu lingkungan hidup melalui berita jurnanisme lingkungan. Isu kerusakan lingkungan hidup, pemanasan global, perubahan iklim merupakan beberapa isu yang diangkat oleh media masa menjadi produk berita.

Berita jurnanisme lingkungan yang dimuat oleh media massa akan lebih berarti jika memperkenalkan jurnanisme lingkungan hidup yang berpihak kepada kesinambungan lingkungan hidup (Abrar, 1993:9). Pada prakteknya, banyak media massa yang memperkenalkan jurnanisme lingkungan tak berpihak kepada lingkungan hidup itu sendiri. Berita Kedaulatan Rakyat berjudul *Tanah Liat Sulit Didapatkan, Modal Usaha Genteng Membengkak* (12 Juni 2012), menggunakan bahan baku berita lingkungan hidup yang dikelola oleh manusia, namun keberpihakan terhadap lingkungan hidup masih kurang. Padahal seharusnya, berita lingkungan lebih mengedepankan aspek ekologi. Dalam *lead* wartawan menulis,

Industri genteng di Kebumen yang dikenal memiliki produk genteng soka sampai kini telah berjalan puluhan tahun. Karena itu, eksploitasi tanah liat secara terus menerus mengakibatkan persediaan tanah liat kini semakin menipis. Para pengusaha genteng pun kini kesulitan mendapatkan lahan untuk digali tanah liatnya.

Angle berita tersebut tak berfokus pada aspek kesinambungan lingkungan hidup, melainkan fokus pada masalah ekonomi yang dialami oleh warga sebagai

pengrajin genteng. Wartawan tak memberitakan secara holistik mengenai dampak dari lingkungan dan fungsi pendidikan dari aktivitas eksploitasi tanah liat. Kerugian yang dialami oleh warga hanya dilihat dari sisi ekonomi jangka pendek. Sedangkan kerugian jangka panjang, yakni berubahnya ekosistem dan hilangnya *top soil* untuk aktivitas pertanian tak disampaikan oleh surat kabar tersebut.

Tribun Jogja pada Selasa, 31 Januari 2012 juga memuat berita kerusakan lingkungan dengan judul *Yanto Catat Kerugian Rp 3,8 M, Angin Kencang Rusak Ribuan Rumah*. Pada berita tersebut Tribun Jogja memilih isu-isu kerusakan lingkungan dan kerugian finansial akibat bencana alam sebagai *angle* berita. Sedangkan pada isu penyebab terjadinya badai tersebut tak ungkapkan oleh wartawan. Padahal jika wartawan mencari informasi pada BMKG tentu akan memperoleh prakiraan waktu terjadinya bencana, sehingga warga bisa lebih waspada.

Pada pemberitaan lain, peneliti mengamati bahwa faktor alam dianggap sebagai musabab utama dalam kerusakan lingkungan. Seperti berita di Kedaulatan Rakyat berjudul *Kera Rusak 30 Hektare Tanaman Ketela*, 15 Juni 2012. Wartawan menulis berita bahwa penyebab gagal panen ketela di Purworejo lantaran kera yang berasal dari hutan tanaman produksi milik Perhutani merusak areal pertanian warga.

Berita jurnalisme lingkungan seharusnya melibatkan berbagai macam disiplin ilmu agar pemberitaan nampak holistik. Jika berangkat dari pandangan sebab-akibat, tentu ada penyebab kera tersebut memakan tanaman ketela warga, seperti rusaknya habitat dan berkurangnya sumber pangan binatang tersebut.

Terlebih dalam berita disebutkan bahwa kera berasal dari hutan tanaman produksi petak 46 milik Perhutani. Ini mengindikasikan bahwa ada perubahan ekosistem dalam hutan produksi tersebut oleh pengelola yang menyebabkan kera turun ke areal pertanian warga. Kurangnya pemahaman wartawan terhadap penguasaan bidang keilmuan lain menyebabkan faktor alam sebagai alasan yang paling logis dalam berita kerusakan lingkungan hidup.

Beberapa penelitian mengenai kajian terhadap berita lingkungan dalam media menemukan bahwa media massa seringkali tak berpihak pada lingkungan hidup itu sendiri. Media massa memandang persoalan lingkungan hidup masih terpisah dengan isu lain seperti sosial, ekonomi, politik. Harian Jogja memilih bersikap praktis dan pemberitaan jangka pendek dalam menyikapi kasus penambangan pasir besi di Kulonprogo, yakni dengan menonjolkan aspek ekonomi (Ayudi, 2011:211).

Demikian pula penelitian Eko Kurniawan, peneliti melakukan studi komparasi kuantitatif pada surat kabar Bangka Pos, Babel Pos dan Rakyat Pos dalam implikasi kebijakan pengelolaan lingkungan. Kesimpulan tesis ini menjelaskan bahwa isu-isu yang dimunculkan oleh ketiga surat kabar tersebut adalah isu-isu dampak lingkungan yang kemudian diikuti isu hukum lingkungan dan isu kebijakan lingkungan. Sementara isu pendidikan lingkungan, konflik lingkungan dan partisipasi lingkungan jarang diakomodasi oleh institusi pers tersebut (Kurniawan, 2006:112).

Melihat fenomena pemberitaan dan hasil penelitian, pers seringkali melakukan kesalahan dalam pemberitaan lingkungan hidup diberbagai macam

media. Salomone setidaknya mencatat terdapat tiga kesalahan, yakni tiadanya informasi yang relevan dengan latar belakang pemberitaan, judul berita yang sering menyesatkan dan tiadanya keinginan lebih dalam risiko pemberitaan (Abrar, 1993:60).

Ketika wartawan akan mencari dan menulis suatu akar permasalahan, ia akan menghadapi suatu risiko yakni berhadapan dengan kekuatan yang saling menekan satu sama lain baik pihak swasta, pemerintah bahkan perusahaan pers itu sendiri. Ketika akar permasalahan ini teridentifikasi memiliki kaitan dengan pihak yang lebih memiliki *power*, seringkali terjadi *absentia* faktor manusia sehingga alasan bencana alam merupakan alasan yang paling logis yang dapat diterima oleh pembaca. Kondisi ini menyebabkan pers kontraproduktif sebagai lembaga *watchdog*.

Padaahal, institusi pers memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Mc Combs dan Shaw menyebutkan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer isu saliansi pada agenda berita yang mereka buat kepada agenda publik (Griffin, 2003:390). Teori Agenda Setting menjelaskan media pers memiliki peran penting dalam menentukan opini publik melalui agenda media. Isu tersebut kemudian akan menjadi agenda publik dan akan mempengaruhi masyarakat dalam mengambil keputusan.

Agenda media inilah yang kemudian berperan besar dalam pemberitaan seperti kasus kerusakan lingkungan. Cara berpikir masyarakat dan agenda publik akan tercipta melalui seberapa intens pers menyampaikan isu-isu kerusakan lingkungan hidup. Semakin intens media mengangkat isu kerusakan lingkungan,

maka akan menjadi topik agenda publik. Bahkan dalam tahap pengambilan keputusan, masyarakat akan menerima preferensi nilai yang disampaikan oleh pers.

Pada agenda media, akan nampak bagaimana pers menonjolkan beberapa isu sebagai pemberitaan utama mereka. Isu-isu yang ditonjolkan inilah yang mendapat perhatian dari publik sehingga terdapat isu yang mendapat prioritas sedangkan isu lain menjadi tenggelam. Demikian pula yang terjadi pada fenomena yang diamati oleh peneliti. Semakin pers memberitakan bencana alam sebagai faktor kerusakan lingkungan, maka akan tercipta opini publik bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini karena faktor alam. Padahal, faktor alam tak berdiri sendiri, melainkan terdapat faktor manusia yang turut memicu kerusakan lingkungan.

Dalam penelitian kuantitatif mengenai agenda media ini, peneliti memilih surat kabar Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja sebagai objek penelitian. Pemilihan Tribun Jogja karena merupakan salah satu *holding company* dari Kompas Gramedia. Pada tahun 2009, Harian Kompas menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup yakni Kategori Surat Kabar Peduli Lingkungan dan Surat Kabar untuk Berita Foto Lingkungan (www.menlh.go.id, 30 April 2013). Pemilihan Tribun Jogja sebagai asumsi bahwa ini karakteristik berita lingkungan Harian Kompas juga dimiliki oleh salah satu surat kabar *holding company*-nya, yakni Tribun Jogja.

Sedangkan Harian Kedaulatan Rakyat dipilih karena pada tahun 2011, Kedaulatan Rakyat mendapatkan penghargaan ‘Walikota Award’ sebagai lembaga

media yang aktif dalam upaya pelestarian lingkungan di provinsi Yogyakarta (www.ccphi.org, 12 Maret 2013). Melalui penghargaan ini, peneliti berasumsi bahwa SKH Kedaulatan Rakyat memiliki saliansi pada isu-isu lingkungan hidup.

Disamping itu pada bulan Februari 2013, Kedaulatan Rakyat bersama Tribun Jogja menerima penghargaan *Silver Award* untuk *Kategori The Best of Java Newspaper IPMA (Indonesia Print Media Award) 2013* (www.spsindonesia.org, 30 April 2013) Penghargaan ini sebagai bukti bahwa kedua media memiliki redaksi dengan performa baik dalam praktek penerbitan surat kabar. Pemilihan kedua surat kabar dengan karakter hampir sama ini menjadikan penelitian hanya memfokuskan pada deskripsi kedua surat kabar dalam pemberitaan isu kerusakan lingkungan.

Urgensi agenda media dalam proses komunikasi membawa peneliti pada pemahaman bahwa isu-isu yang ditonjolkan dalam pemberitaan pers sangat penting untuk diteliti terutama berkaitan isu-isu kerusakan lingkungan. Kekhasan agenda media dalam penelitian ini untuk melihat isu-isu yang menjadi prioritas agenda surat kabar dengan beberapa cara. Melalui sudut pandang jurnalisme lingkungan, peneliti ingin melihat bagaimana kecenderungan agenda media dalam surat kabar harian lokal tersebut saat memberitakan isu-isu kerusakan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kecenderungan agenda media pers lokal dalam pemberitaan isu kerusakan lingkungan hidup dalam surat kabar Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja periode 22 Mei 2012 – 19 Juni 2012?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui kecenderungan agenda media dalam pemberitaan isu kerusakan lingkungan pada harian SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Tribun Jogja.

D. Manfaat Penelitian

D1. Manfaat Teoritis

Menambah kajian analisis pada agenda media dalam pemberitaan isu-isu penting bagi publik dalam surat kabar harian.

D2. Manfaat Praktis

- a. Memberi gambaran kecenderungan pemberitaan jurnalisme lingkungan dalam pers lokal.
- b. Memberi gambaran prioritas isu pelestarian lingkungan dalam pemberitaan pers lokal.

E. Landasan Teori

Agenda Media sebagai Proses *Agenda Setting*

Agenda setting terbentuk melalui 3 penelitian yang saling berkaitan dan saling berhubungan satu sama lain. Penelitian pertama adalah *agenda media setting* karena memiliki variabel yang tergantung pada isu dalam agenda media massa. Kedua yakni agenda publik karena variabel amat tergantung pada seberapa penting suatu isu dibentuk dalam agenda publik. Ketiga disebut agenda kebijakan karena merupakan pengambilan kebijakan mengenai suatu masalah. Kebijakan ini sebagai respon terhadap agenda media dan agenda publik. (Rogers & Dearing: 1996:6).

Dalam penelitian *agenda setting*, penentuan agenda media menjadi tahapan paling berpengaruh dalam teori efek media ini. Asumsi awal penentuan agenda sendiri karena konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu lain (Tamburaka, 2012:23). Media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi cara berpikir audiens dalam merespon isu yang disampaikan oleh media tersebut. Bernard Cohen menyebut, *the press may not be successful much of the time in telling people that to think, but it is stunningly successful in telling its readers what to think about* (Rogers & Dearing, 1996:1).

Terdapat dua perspektif untuk memahami tujuan dalam penentuan agenda, yakni luas dan sempit. Dalam perspektif luas, media massa melakukan agenda untuk memainkan kontrol yang lebih besar terhadap kontrol opini publik untuk mengendalikan kebijakan publik. Dalam perspektif sempit, ada agen-agen tertentu di media massa secara individual ingin mengarahkan opini publik pada maksud-maksud tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu pula (Tamburaka, 2012:73).

Norton Long memberi pandangan mengenai klausul agenda media dengan praktek penerbitan surat kabar,

Surat kabar adalah penggerak utama dalam menentukan agenda daerah. Surat kabar memiliki andil besar dalam menentukan apa yang akan dibahas oleh sebagian besar orang, apa pendapat sebagian besar orang tentang fakta yang ada, dan apa yang dianggap sebagian besar orang sebagai cara untuk menangani masalah. (Tamburaka, 2012:22)

Pada penerbitan surat kabar daerah, penentuan agenda berperan penting dalam menentukan pendapat suatu lokalitas masyarakat dalam memahami

lingkungan sekitarnya. Hal ini karena faktor *proximity*, yang menyebabkan orang di suatu daerah akan lebih memilih untuk membaca berita mengenai lingkungan sekitarnya. Sehingga agenda daerah akan mempengaruhi masyarakat lokal untuk mengambil kebijakan dalam menangani suatu masalah.

Penelitian ini mengkhususkan pada proses agenda media sebagai kerangka berpikir peneliti. Hal ini karena proses *agenda setting* dimulai dengan membangun isu dari agenda media (Rogers & Dearing, 1996:24). Melalui agenda media yang terdapat dalam surat kabar lokal, peneliti berusaha membaca bagaimana kecenderungan pemberitaan isu kerusakan lingkungan yang terakomodasi dalam agenda masing-masing surat kabar harian.

Melalui pandangan agenda media, penelitian analisis isi ini akan dapat melihat prioritas pemberitaan surat kabar dalam mengangkat masalah kerusakan lingkungan hidup. Isu-isu mana yang dipilih oleh wartawan untuk menjadi berita dan ditonjolkan dengan beberapa cara sebelum menjadi sebuah agenda publik.

F. Kerangka Konsep

F.1 Agenda Media Surat Kabar

Lazarsfeld dan Robert K. Merton memberikan pandangan bahwa *The mass media confer status on public issues, persons, organizations and social movements* (Dearing & Rodgers, 1996:24). Namun sebelum media dapat mempengaruhi publik, person, organisasi melalui isu, agenda media haruslah diformat terlebih dahulu. Proses ini akan memunculkan permasalahan bagaimana agenda media akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi yang mempengaruhi media.

Dimensi yang perlu diperhatikan yakni *visibility* yakni kuantitas jumlah serta tingkat penonjolan terhadap isu yang diangkat menjadi berita. Kedua yakni *audience salience*, yakni tingkat isu-isu yang menonjol bagi khalayak. Serta valiansi, sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terkait pemberitaan bagi peristiwa yang terjadi (Tamburaka, 2012:69).

Dalam penentuan agenda, langkah penting yang harus dilakukan media adalah transfer isu-isu saliansi yang berkembang di tengah masyarakat dan mengangkatnya menjadi realitas media.

Saliense is the degree to which an issue on the agenda is perceived as relatively important. The heart of the agenda-setting process is when the salience of an issue changes on the media agenda, the public agenda or the policy agenda (Rogers & Dearing, 1996:8).

Media massa melakukan seleksi terhadap isu-isu yang berkembang di publik. Ketika telah melakukan seleksi, media memberi aspek penonjolan pada isu tersebut agar menjadi prioritas perhatian bagi publik untuk menjadi opini umum hingga melahirkan suatu kebijakan. Penonjolan isu pada agenda media itu dapat dilakukan dengan dua cara yakni penempatan posisi berita serta panjang berita.

They established position and length of story as two main criteria of prominence. For newspapers, the front-page headline story, a three-column story on an inside page, and the lead editorial were ll counted as evidence of significant focus on an issue. (Griffin, 2003: 392)

Pada praktek penerbitan surat kabar, tempat-tempat tertentu akan menjadi fokus pembaca. Seperti *headline* dan halaman belakang kemudian pada bagian atas halaman, merupakan posisi strategis bagi wartawan untuk menarik fokus pembaca.

Selain posisi tata letak berita, rubrikasi juga merupakan salah satu komponen untuk melihat penempatan suatu berita. Suatu berita dapat dimasukkan ke berbagai bidang rubrik seperti ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, mancanegara, olahraga dan sebagainya. Menurut Eriyanto, rubrikasi ini haruslah dipahami tidak semata-mata sebagai persoalan teknis atau prosedur standar dari pembuatan berita. Ia haruslah dipahami sebagai bagian dari bagaimana fakta diklasifikasikan dalam kategori tertentu (Eriyanto, 2011:192).

Rubrikasi ini menentukan bagaimana peristiwa dan fenomena harus dijelaskan. Rubrikasi ini bisa jadi miskategorisasi-peristiwa yang seharusnya dikategorisasikan dalam satu kasus, tetapi karena masuk dalam rubrik tertentu, akhirnya dikategorisasikan dalam dimensi tertentu (Eriyanto, 2011:193).

Surat kabar memberitakan isu dengan halaman yang panjang mencerminkan agenda yang dibawa oleh media kepada publik (Eriyanto, 2011:197). Panjang berita menurut Abrar, juga merupakan salah satu perangkat untuk menganalisis suatu berita dalam penelitian analisis isi kuantitatif melalui fisik berita (Abrar, 1993:34). Melalui panjang tulisan, peneliti dapat melihat seberapa besar atensi wartawan dalam mengangkat isu-isu tertentu.

Surat kabar yang memberitakan isu dalam jumlah yang besar, dengan halaman yang panjang, dan ditempatkan di tempat yang mencolok mencerminkan agenda yang dibawa oleh media kepada publik (Eriyanto, 2011:197). Melalui kerangka konsep agenda media ini, penulis memahami bagaimana aplikasi dan cara membaca agenda media SKH Tribun Jogja dan SKH Kedaulatan Rakyat dalam pemberitaan jurnalisme lingkungan.

F.2 Isu Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Jurnalisme Lingkungan

F.2. a Kerusakan lingkungan hidup

Lingkungan hidup dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (2002:675).

Pembentukan sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor (Soemarwoto, 1994:53). Pertama yakni perbandingan jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan itu. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Faktor keempat adalah faktor non-materiil seperti iklim, cahaya, udara.

Perubahan lingkungan oleh manusia sendiri sering terjadi. Hubungan manusia dengan lingkungannya menurut Soemarwoto adalah sirkuler (1994:57). Pada UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 1997, pasal 1 ayat 14, perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Definisi kerusakan dalam penelitian ini yakni peristiwa karena alam atau manusia yang menimbulkan perubahan langsung maupun tak langsung terhadap sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan kerugian pada unsur lingkungan hidup.

Menurut Emil Salim, suatu perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup karena terjadi suatu proses pembangunan (Salim, 1993:11). Namun sayangnya, proses pembangunan ekonomi tak diimbangi dengan upaya pelestarian terhadap lingkungan hidup. Menurut Emil Salim, pangkal sebab timbulnya pola pembangunan dengan kerusakan lingkungan ini terletak pada pengelihan manusia yang melihat dirinya terpisah dari lingkungan alam dalam posisi kedudukannya sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban mengolah, mengelola, dan mengeksploitasi sumber alam untuk kemajuan kehidupan materiil (Salim, 1993:23). Sedangkan pada hakikatnya, posisi manusia sendiri berada di dalam ekosistem lingkungan alam, menjadi kesatuan yang holistik.

Kerusakan lingkungan hidup memang banyak menampilkan manusia sebagai aktor utama. Namun faktor lain juga turut andil dalam pembentukan kerusakan lingkungan yakni alam. Wisnu Wardhana menyebut dua faktor ini sebagai penyumbang kerusakan lingkungan (Wardhana, 2004:16-17).

a. Kerusakan karena Faktor Internal

Kerusakan internal disebabkan dari dalam alam sendiri. Hal ini terjadi akibat faktor internal pada daya dukung alam sulit untuk dicegah karena merupakan proses alami yang terjadi pada bumi/alam yang sedang mencari keseimbangan dirinya. Kerusakan terjadi dalam tempo singkat, namun menimbulkan eksese dalam jangka panjang.

b. Kerusakan karena Faktor Eksternal

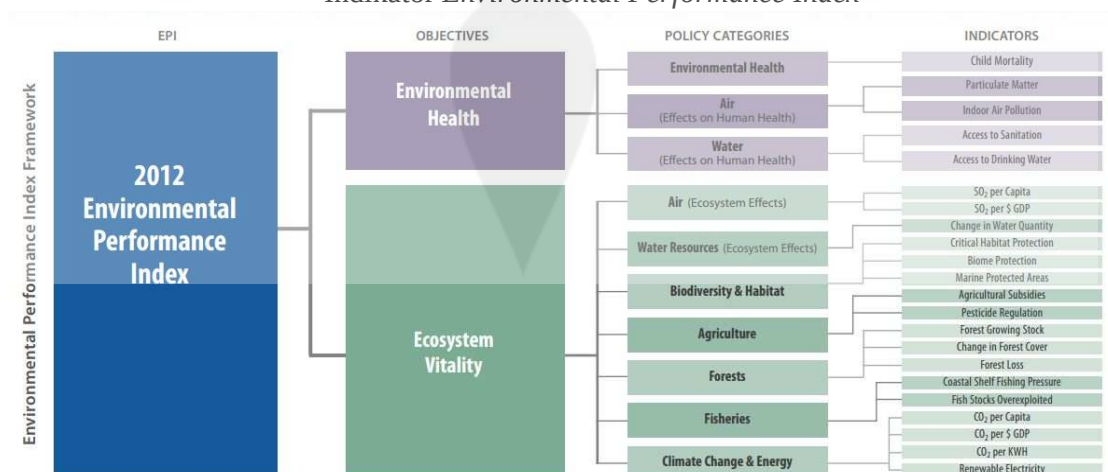
Faktor eksternal ini sebagai akibat ulah manusia dalam rangka meningkatkan dan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Kerusakan karena faktor

eksternal pada umumnya disebabkan oleh karena ekonomi pembangunan. Seperti kegiatan industri, berupa limbah buangan industri, perambahan hutan, pemakaian zat-zat kimia dalam pertanian dan sebagainya.

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kerusakan lingkungan melalui *Environmental Performance Index*. Indeks ini merupakan metode kuantitas guna mengetahui seberapa besar proteksi negara-negara di dunia terhadap kualitas lingkungannya. Indeks ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2002 sebagai hasil program kerjasama *Yale University* dan *Columbia University* dengan lembaga *World Economic Forum* dan *Joint Research Center of the European Commission*. Penggunaan EPI ini telah menjadi standar internasional dalam mengukur kualitas lingkungan hidup negara-negara di dunia.

Pada tahun 2012, EPI membuat sepuluh kategori kebijakan untuk menentukan bidang-bidang lingkungan mana yang akan termasuk dalam komponen indeks. Bidang ini digunakan peneliti untuk menentukan prioritas isu lingkungan yang diberitakan oleh media. Kesepuluh indikator tersebut terbagi dalam dua objek yakni *Environmental Health* dan *Ecosystem Vitality*.

Grafik 1.1
Indikator *Environmental Performance Index*



Sumber: www.epi.yale.edu/Appendix1, diakses 15 April 2012.

Pertama yakni polusi udara yang berefek pada kesehatan manusia. Setiap perubahan kualitas udara yang memiliki dampak bagi kesehatan manusia masuk dalam indikator ini. Kedua yakni air sebagai efek kesehatan manusia. Indikator ini memiliki fokus pada ketersediaan atau akses sanitasi air bersih untuk distribusi hingga konsumsi manusia, kualitas dan kuantitas air untuk konsumsi manusia.

Index ini juga membuat indikator polusi udara yang memberi dampak pada ekosistem. Seperti presentasi SO₂, CO₂, akan sangat mempengaruhi sistem kerja kesehatan makhluk hidup. Indikator selanjutnya yakni air, berfokus pada kualitas air di muka bumi sebagai bagian ekosistem. Ranah kualitas air meliputi air permukaan dan air tanah. Indeks EPI juga menilai berdasarkan pola pengolahan air limbah untuk keperluan industri. Untuk melihat sisi ekosistem yang hidup, Indeks EPI juga menggunakan keragaman hayati dan ekosistem baik berupa situs hayati maupun ragam spesies menjadi fokus indikator. Perspektif penilaian diambil dari konservasi, proteksi dan prioritas utama terhadap keragaman hayati.

Bidang lain untuk melihat indeks kerusakan lingkungan berdasarkan cakupan bidang yakni kehutanan, perikanan, pertanian. Pada indikator kehutanan memiliki bagian pada deforestasi, perubahan permukaan hutan, penurunan luas wilayah hutan, tanah longsor, reduksi hutan sebagai sarana pertanian, ekspansi urban hingga keperluan industri mendorong kualitas lingkungan yang memburuk.

Indikator perikanan meliputi ketersediaan spesies dan keanekaragaman hayati bawah laut menjadi prioritas utama. Cara pemanfaatan hingga pengelolaan

menjadi kajian khusus terhadap kualitas lingkungan laut. Sedangkan bidang pertanian meliputi manajemen pengelolaan tanah, pertambangan daratan, pemanfaatan lahan sebagai sarana pertanian atau perumahan, hingga kondisi penggunaan zat kimia untuk pertanian.

Indikator lain untuk yakni perubahan iklim, indikator ini dapat dihitung melalui perubahan komponen udara dalam suatu lingkungan. Perubahan komponen seperti CFC, CO₂, pemanfaatan energi listrik merupakan pendorong perubahan iklim dan peningkatan emisi. Termasuk didalamnya penggunaan bahan bakar yang dapat diperbaharui untuk kebutuhan listrik.

Pada konten media, tak semua bidang di atas memperoleh pemberitaan. Tercatat dalam penelitian yang dilakukan oleh Tyson Miller berjudul *Environmental Coverage In The Mainstream News*, isu lingkungan yang sering mendapat pemberitaan pada media ABC, CBS, NBC, CNN dan Fox News selama tahun 2011-2012 yakni perubahan iklim (244 berita) dan kesehatan lingkungan sebanyak 28 berita (Miller, 2012:3, diakses melalui <http://greeningthemedias.org/>).

Menurut Aca Sugandhy pengelolaan terhadap berbagai masalah lingkungan masih bersifat represif/kuratif. Sedangkan aspek preventif seperti pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya lingkungan, belum memadai (Atmakusumah, 1996:190). Padahal UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 pasal 10 lebih menekankan pada upaya pencegahan kerusakan lingkungan bersifat preemtif, preventif dan proaktif. Urgensi pencegahan ini nampak pula pada tugas utama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Keppres No 10 Tahun 2000. Pengendalian dampak lingkungan hidup yang

meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup (Keppres No 10 Tahun 2000, pasal 2).

F.2. b Jurnalisme lingkungan hidup

Pada era industri, sejalan dengan derap pembangunan yang tidak mungkin akan selalu bebas pencemaran dan pengrusakan lingkungan, dan setiap kasus pencemaran tersebut bernilai berita (Atmakusumah, 1996:29). Perlunya pemberitaan kerusakan lingkungan ini karena setiap pencemaran berdampak negatif bagi publik.

Masalah lingkungan hidup sering diabaikan oleh media Indonesia. Menurut George Aditjondro, pengabaian ini dapat dilihat dari rubrikasi. Banyak media Indonesia tak memiliki rubrik lingkungan, akibatnya masalah atau peristiwa yang seharusnya diklasifikasikan sebagai masalah lingkungan masuk ke dalam rubrikasi non-lingkungan-ekonomi, hukum bahkan kriminalitas (Eriyanto, 2011:193). Namun pada sisi lain, jurnalisme lingkungan menurut Maria Hartiningsih memiliki kompleksitas yang melibatkan tak hanya informasi teknis, namun juga ekonomi, politik, dan sosial (Atmakusumah, 1996:38). Hal ini berarti meskipun berita lingkungan ditempatkan dalam rubrik lingkungan, namun dalam pemberitaannya tetap memerlukan pandangan keilmuan yang lain agar pembaca memahami isu kerusakan lingkungan.

Berita lingkungan pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan berita lain, yang membedakan adalah realitas yang menjadi bahan bakunya seperti polusi udara dan suara, penggundulan hutan, pencemaran sampah (Abrar, 1993:7).

Michael Frome memberikan pandangan lain mengenai distingsi antara jurnalisme lingkungan dengan jurnalisme pada umumnya.

Environmental journalism differs from traditional journalism. It plays by a set of rules based on a consciousness different from the dominant in modern American society. It is more than a way of reporting and writing, but a way of living, of looking at the world, and at oneself. (Frome,1998:21).

Jurnalisme lingkungan memiliki nilai plus dibandingkan dengan jurnalisme lainnya. Jurnalisme lingkungan memberikan solusi, cara hidup, pandangan masa depan mengenai kehidupan manusia. Ini pula yang menjadikan cara penulisan jurnalisme berbeda, menulis dengan jangkauan yang lebih dalam, permulaan, pertengahan dan akhir yang mengintegrasikan hubungan semuanya dan tak sesimpel berita pada *Who, What, When, Where, Why and How* (Frome, 1998:22).

Dalam pemberitaan berita lingkungan wartawan dapat memilih beberapa fokus masalah pemberitaan seperti fokus pada masalah-masalah substantif seperti hutan, pencemaran, sumber daya alam. Bisa pula fokus pemberitaan pada pengelolaan lingkungan serta kebijakan yang mendukungnya. Serta fokus masalah pertanggungjawaban mengenai penanganan lingkungan hidup (Atmakusumah, 1996:64). Namun tak sedikit pula liputan wartawan yang sesekali saja pada umumnya akan terarah pada masalah lingkungan hidup yang timbul dan yang diperkirakan akan pantas menjadi berita (Atmakusumah, 1996:62).

Dalam memahami kompleksitasnya, wartawan terlebih dahulu harus memiliki pemahaman lingkungan hidup sebagai dasar jurnalisme lingkungan serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. M.S Kismadi menyebutkan terdapat dua langkah untuk memahami jurnalisme lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Pertama pemahaman ruang lingkup permasalahan dan kelompok-kelompok fakta baku. Tahap ini menandakan suatu bentuk objektivitas dari berita yang telah ditulis oleh wartawan. Pemberitaan masalah lingkungan hidup seperti konflik kepentingan bisa dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu pihak yang sedang menghadapi konflik, dan menulis berita memihak merupakan hal tabu bagi wartawan (Siregar,1998:218). Oleh karena itu perlu menulis berita secara seimbang dan memberi kesempatan pada kedua pihak untuk mengungkapkan pandangannya (Siregar, 1998:216).

Di samping itu, wartawan dalam pemberitaan lingkungan sering terlambat menyadari efek realitas tersebut di tengah-tengah sistem sosial (Abrar, 1993:14). Wartawan seringkali menganggap suatu peristiwa bukan merupakan masalah lingkungan hidup, melainkan masalah pada bidang lain seperti ekonomi atau sosial, hal ini nampak dalam pemilihan narasumber. Oleh karena itulah perlu agar wartawan menekankan pemahaman pada konsep biosfer menjadi landasan dalam menggolongkan fakta dan unsur lingkungan hidup (Atmakusumah, 1996:66). Konsep biosfer tersebut dapat diperoleh ketika memilih narasumber kredibel seperti ilmuwan, akademisi, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Kedua adalah pendekatan dan asas-asas untuk mengenal, menganalisis dan menginterpretasikan masalah-masalah (kombinasi fakta-fakta tertentu) yang akan diliput. Wartawan dituntut untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi. Hubungan sebab-akibat yang terjadi pada masalah lingkungan hidup serta langkah penyelesaian masalah tersebut.

Pada hubungan sebab akibat, seorang wartawan membutuhkan pengetahuan yang cukup komprehensif tentang hubungan alam, manusia, pembangunan dan ekonomi secara holistik, dampak fisik dan sosial kerusakan lingkungan hidup (Abrar, 1993:9). Pihak dan penyebab kerusakan lingkungan merupakan hal penting untuk mengetahui letak pertanggungjawaban serta mengidentifikasi berbagai pilihan untuk menangani masalah (Atmakusumah, 1996:64)

Dalam peliputan mengenai akibat yang ditimbulkan dalam masalah lingkungan wartawan harus melihat permasalahan dalam konteks yang luas (Atmakusumah, 1996:63). Hal ini tak lain karena informasi dalam isu lingkungan hidup bersifat multidisipliner (Abrar, 1993:13). Sehingga menurut M.S Kismadi, wartawan harus melihat suatu akibat dari berbagai sisi yakni gatra ekologis, gatra sosial dan gatra ekonomi pembangunan (Atmakusumah, 1996:63).

Berita tak cukup berhenti pada hubungan sebab akibat dan hanya memberitahu, tetapi juga mendidik dan melakukan pengawasan (Abrar, 1993:47). Pada fungsi edukasi, wartawan perlu memberikan solusi dari masalah-masalah lingkungan. Solusi penting sebagai langkah edukatif atas apa yang seharusnya publik lakukan saat membaca berita masalah lingkungan.

Seringkali wartawan tak mampu mengungkap berita hingga pada akar permasalahan karena kepentingan-kepentingan lain. Berita jurnalisme lingkungan akan lebih berarti jika memperkenalkan jurnalisme lingkungan hidup yang berpihak kepada kesinambungan lingkungan hidup (Abrar,1993:9). Kesinambungan berarti bahwa pemberitaan jurnalisme lingkungan kembali pada

tujuan pelestarian lingkungan sehingga dapat terus diwariskan dari generasi kegenerasi.

Maria Hartiningsih menyebutkan dalam penulisan isu lingkungan tidak hanya ada satu atau dua sisi, tetapi banyak. Meskipun dalam prakteknya seringkali isu lingkungan diliput sebagai *single event story* (Atmakusumah, 1996:39). Andre Nikiforuk mengungkapkan pula bahwa berita tidak hanya menyajikan efek sebuah realitas lingkungan hidup terhadap alam, tetapi kaitannya dengan aspek politik, sosial dan ekonomi (Abrar, 1993:134).

Peranan pers dalam peliputan isu lingkungan juga tak hanya memberikan informasi represif namun juga preventif. Lisa Rademaker menyebut tujuan *environmental journalism* untuk menginformasikan pada publik supaya publik membuat suatu keputusan dalam ruang demokrasi (Rademakers, 2004:22).

Berdasarkan jurnalisme lingkungan ini maka diperlukan tak hanya berita yang sekedar mengawasi suatu peristiwa yang telah terjadi, namun juga mendidik pembaca agar mampu menanggulangi kasus-kasus kerusakan lingkungan. Abrar memberikan kriteria umum bagi berita yang memenuhi standar jurnalisme lingkungan (Abrar, 1993: 48). Salah satunya menyajikan analisis untung dan rugi, pers seharusnya memberitakan isu lingkungan baik dari sisi negatif maupun positif kasus tersebut. Salah satu cara dengan membuat perhitungan rupiah berapa untung dan berapa rugi, sehingga pembaca dapat menentukan pilihannya.

Di samping itu, wartawan perlu menaikkan tingkat relevansi informasi. Relevansi berpedoman kepada nilai berita, wartawan lingkungan hidup menilai bencana alam yang menyebabkan lahirnya krisis lingkungan hidup pantas

diberitakan (Abrar, 1993:51). Jurnalisme lingkungan tak menganjurkan adanya pembesaran suatu realitas lingkungan hidup. Namun perlu pula untuk melihat relevansi berita bagi kehidupan masyarakat.

Wartawan dituntut untuk berusaha mencerdaskan masyarakat mengenai lingkungan hidup dan keterpautannya dengan kehidupan sehari-hari (Atmakusumah, 1996:63). Dalam membuat relevansi tersebut, Abrar memberikan pandangan bahwa wartawan tidak menutup mata terhadap realitas lingkungan hidup yang lain (Abrar, 1993:51).

F.3 Berita dan Pers Lokal

Sumardiria menjelaskan berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet (Sumardiria, 2006: 65).

Wartawan merefleksikan realitas sosial yang diamatinya bisa dilihat melalui berita-berita yang mereka siarkan diantaranya melalui nilai berita, sumber berita dan panjang berita (Abrar, 1993:33). Ada beberapa alasan mengapa suatu peristiwa diberitakan oleh wartawan dan beberapa yang lain tidak. Untuk menganalisis suatu peristiwa dianggap sebagai peristiwa penting atau tidak ditentukan pula berdasarkan panjang atau pendeknya suatu berita yang ditulis (Eriyanto, 2011:28).

Surat kabar memberitakan isu dengan halaman yang panjang mencerminkan agenda yang dibawa oleh media kepada publik (Eriyanto, 2011:197). Ketika suatu

peristiwa kerusakan lingkungan tanah longsor diberitakan secara lengkap dengan porsi yang banyak tentu ada maksud dan tujuan tertentu dari institusi media. Kategori panjang berita dapat dilihat dari berbagai macam cara. Eriyanto membaca panjang berita dalam mm (milimeter) kolom (2011:198), sedangkan Abrar membaca panjang berita melalui jumlah paragraf pada berita yang dimuat (1993:35).

Pers sendiri mengandung dua pengertian yakni pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Dalam arti sempit pers hanya menunjuk kepada media cetak berkala. Sedangkan dalam arti luas tak hanya merujuk pada media cetak berkala melainkan segala media massa (Sumardiria, 2006:31). Pada penelitian ini, peneliti lebih memakai pengertian pers sempit yakni media cetak berkala yakni surat kabar harian pada tingkat lokal. *Scope* pers lokal beredar di sebuah kota dan sekitarnya, salah satu ciri pers lokal ialah 80% isinya didominasi oleh berita, laporan, tulisan, dan sajian gambar bernuansa lokal (Sumardiria, 2006:42). Terbitnya pers-pers lokal baru ini sebagai perwujudan representasi kearifan lokal yang perlu untuk disuarakan karena dalam pemberitaan tersebut keterwakilan nilai-nilai berita daerah menjadi suara mayoritas.

Karena memiliki mencakup wilayah lokal maka sebagian besar redaksi pers lokal menggunakan sifat kedekatan geografis dan psikologis dalam penggalan sumber-sumber berita (Sumardiria, 2006: 42). Langkah ini kemudian nampak pada rubrikasi pers lokal yang membuat halaman-halaman daerah untuk mengakomodasi sumber berita dari wilayah persebaran koran tersebut.

Lokalitas tersebut juga membawa pers lokal untuk memprioritaskan pemberitaan mengenai isu-isu lingkungan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tyson Miller berjudul *Environmental Coverage In The Mainstream News* (1 Januari 2011 – 31 Mei 2012) menemukan bahwa pemberitaan isu lingkungan pada surat kabar nasional Amerika Serikat dan Eropa memiliki presentase pemberitaan paling rendah daripada isu-isu kriminal dan hiburan. Sedangkan pada surat kabar lokal, pemberitaan mengenai isu lingkungan jauh lebih banyak dari pada topik hiburan. Surat kabar lokal sebagai media dengan prioritas pemberitaan isu lingkungan paling tinggi daripada media lain seperti berita radio, online, *tv cable* (Miller, 2012:4, diakses melalui <http://greeningthemedias.org/>).

Institusi pers lokal memiliki beberapa kriteria berita dimana peristiwa faktual dapat menjadi berita menarik dan digemari oleh pembaca lingkup lokal. Pada nilai berita, makin banyak sebuah peristiwa memiliki unsur nilai berita, makin besar kemungkinan beritanya disiarkan oleh penerbitan pers (Abrar, 1993:5). Ashadi Siregar memberikan kriteria umum nilai berita menjadi enam kategori. Pertama signifikan (penting), kejadian yang mempengaruhi kehidupan orang banyak dan berakibat bagi pembaca. Kedua *magnitude* (besar), kejadian menyangkut angka-angka yang berarti atau kejadian yang berakibat bisa dijumlahkan dalam angka dan menarik untuk pembaca. Ketiga *timeliness* (waktu), yaitu kejadian menyangkut peristiwa baru terjadi atau baru dikemukakan. Keempat *proximity* (kedekatan), kejadian yang dekat dengan pembaca baik geografis atau psikologis. Kemudian *prominence* (tenar), menyangkut hal terkenal seperti orang, benda, tempat. Terakhir *human interest* (manusiawi), kejadian yang

menyentuh perasaan pembaca, kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi luar biasa atau orang besar dalam situasi biasa (Siregar, 1998:27-28).

Pemilihan sumber berita merupakan hal penting dalam menentukan suatu nilai berita. Sumber ini akan mengembangkan cerita dalam memberikan makna dan kedalaman suatu peristiwa. Sehingga mutu tulisan wartawan tergantung dari mutu sumbernya (Ishwara, 2006:76). Sumber berita dapat diperoleh melalui studi pustaka, observasi, maupun wawancara. Dalam wawancara untuk mencari narasumber perlu dicari relevansi antara pemilihan narasumber dengan topik yang diangkat. Menurut Muhammad Budyatna, terdapat beberapa narasumber yang dapat digunakan dalam penulisan berita, yakni ilmuwan atau teknokrat, birokrat, politisi, atau pihak yang terlibat baik pro maupun kontra terhadap suatu peristiwa yang terjadi, biasanya warga masyarakat (Budyatna, 2006:251-254).

G. Unit Analisis & Definisi Operasional

Penelitian yang dilakukan adalah analisis isi agenda surat kabar lokal dalam pemberitaan isu kerusakan lingkungan hidup. Berikut ini merupakan tabel unit analisis yang diikuti dengan definisi operasional penelitian.

No	Dimensi	Unit Analisis	Kategorisasi	Sub Kategorisasi
1	Pemilihan Isu	Tema pemberitaan	a. Kesehatan Lingkungan b. Air c. Polusi Udara d. Biodiversitas dan Habitat e. Hutan f. Perikanan dan Kelautan g. Pertanian h. Perubahan Iklim	
		Fokus Masalah Pemberitaan	a. Masalah substansi lingkungan b. Pengelolaan lingkungan dan	

			kebijakan yang mendukungnya	
			c. Pertanggungjawaban penanganan masalah lingkungan hidup	
	Panjang Berita	Jumlah Paragraf dalam Berita		
	Penempatan Berita	Lokasi Penempatan Berita	a. Halaman Pertama b. Halaman Kedaerahan c. Halaman Nasional d. Halaman Ekonomi e. Halaman Mancanegara f. Halaman Kriminalitas g. Halaman Belakang h. Halaman Lain yang belum disebutkan di atas	
	Ruang Lingkup	Sumber Berita	Pemerintah	Ada Tidak Ada
			Penegak hukum	Ada Tidak Ada
			Lembaga Swadaya Masyarakat	Ada Tidak Ada
			Masyarakat	Ada Tidak Ada
			Imuwan/Akademisi	Ada Tidak Ada
			Pihak Swasta/ Perusahaan	Ada Tidak Ada
	Interpretasi Masalah	Penyebab	Faktor Internal	
			Faktor Eksternal	- Pemerintah - Warga - Pihak Swasta
			Faktor Campuran	
			Tanpa Penyebab Kerusakan	
		Dampak	Dampak Ekologis	Ada Tidak Ada
			Dampak Ekonomis	Ada Tidak Ada
			Dampak Sosial	Ada Tidak Ada
			Tanpa Dampak Kerusakan	
		Muatan Dampak		

		Kerusakan		
		Solusi	Preventif	Ada
				Tidak Ada
			Represif	Ada
				Tidak Ada
			Tanpa Solusi Kerusakan	
	Relevansi Berita	Nilai berita	Penting	Ada
				Tidak Ada
			Besar	Ada
				Tidak Ada
			Kebaruan	Ada
				Tidak Ada
			Kedekatan	Ada
				Tidak Ada
			Ketenaran	Ada
				Tidak Ada
		Muatan Nilai Berita	Manusiawi	Ada
				Tidak Ada

Pada penelitian ini, peneliti mengadaptasi argumen Griffin (2003:392) bahwa untuk melihat praktek agenda media dalam suatu media surat kabar dapat dilihat dari 3 dimensi yakni jumlah pemilihan isu, panjang berita, dan penempatan berita. Sedangkan hubungan isu kerusakan lingkungan dengan kaidah jurnalisme lingkungan, peneliti menggunakan argumen M.S Kisnadi mengenai tahapan memahami jurnalisme lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yakni ruang lingkup permasalahan dan interpretasi masalah (1996:65). Serta argumen Ana Nadhya Abrar mengenai kriteria berita edukatif jurnalisme lingkungan yakni relevansi berita (1993:48).

G.1 Pemilihan Isu Lingkungan

Dimensi ini untuk menekankan pemberitaan isu-isu bidang kerusakan lingkungan oleh surat kabar lokal. Semakin banyak suatu isu, berarti semakin

banyak agenda surat kabar dalam mengangkat suatu isu lingkungan. Peneliti menggunakan dua unit analisis, tema pemberitaan dan fokus pemberitaan lingkungan.

1.a Tema Pemberitaan, adalah unit analisis yang berfungsi untuk melihat bidang-bidang pengetahuan yang menjadi agenda surat kabar. Peneliti menggunakan delapan tema berkaitan dengan lingkungan hidup untuk mengetahui bidang mana yang menjadi perhatian khusus surat kabar. Kategori bidang untuk melihatnya yakni: (www.epi.yale.edu, 15 April 2013)

- a. **Kesehatan lingkungan** yakni kerusakan yang berdampak pada kesehatan manusia. Seperti hujan abu vulkanik menyebabkan infeksi pernafasan.
- b. **Air**, yakni kerusakan lingkungan berkaitan dengan bidang air seperti banjir bandang, kekeringan, pencemaran air limbah, dsb.
- c. **Udara**, yakni kerusakan lingkungan di wilayah udara seperti polusi, keluarnya gas beracun, dsb.
- d. **Biodiversitas dan habitat**, yakni keanekaragaman kehidupan flora fauna dan habitatnya dalam menghadapi kerusakan lingkungan seperti perburuan liar.
- e. **Kehutanan**, yakni permasalahan yang dialami pada unsur hutan seperti kebakaran hutan, pembalakan liar, alih fungsi guna hutan, dsb.
- f. **Perikanan dan kelautan**, yakni kerusakan yang terjadi pada unsur laut beserta ekosistemnya seperti abrasi, badai laut, perusakan terumbu karang, pencarian ikan dengan bahan kimia, dsb.

- g. **Pertanian**, yakni kerusakan pada bidang pertanian termasuk unsur tanah dan pengelolaannya. Misalkan tanah longsor, erosi, degradasi lahan, penambangan pasir dsb.
- h. **Perubahan iklim**, yakni kerusakan lingkungan pada perubahan iklim, seperti isu efek rumah kaca, isu lubang ozon, pemanasan global, badai tropis, dsb.

1.b Fokus permasalahan lingkungan, yakni pemberitaan isu lingkungan pada suatu tema dengan fokus masalah tertentu. Unit analisis ini untuk melihat kedalaman suatu pemberitaan masalah lingkungan. Semakin fokus pemberitaan mendekati pertanggungjawaban masalah lingkungan maka berita tersebut semakin mendalam. Kategorisasi untuk membacanya yakni:

- a. **Masalah substansi lingkungan**, berfokus hanya pada peristiwa kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, bisa karena faktor manusia maupun faktor alam. Gaya penulisan berupa *straight news* dengan mengedepankan 5W1H. Dalam rangkaian pemberitaan peristiwa kerusakan lingkungan, berita jenis ini merupakan berita yang pertama kali dimuat.
Contohnya yakni pemberitaan kebakaran hutan yang terjadi di lereng Gunung Merapi, atau limbah berbusa yang mencemari Sungai Gajahwong.
- b. **Pengelolaan lingkungan dan kebijakan yang berlaku**, berfokus pada aktivitas manusia dalam mengelola lingkungan hidup. Kategori ini melihat unsur normatif yang membenarkan atau menyalahkan aktivitas manusia melalui aturan/kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan.

Contohnya yakni, berita mengenai penambangan pasir yang tak memiliki izin tambang, atau perburuan terhadap satwa liar yang bertentangan dengan Perda.

- c. **Pertanggungjawaban penanganan masalah lingkungan hidup.** Kategori ini lebih menekankan upaya resolusi dalam menyelesaikan masalah lingkungan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam kerusakan lingkungan. Bentuk tanggung jawab dapat berupa hukuman kepada pelaku kerusakan lingkungan hidup, solusi memperbaiki kerusakan lingkungan oleh warga atau LSM, serta kebijakan yang akan diambil pemerintah sebagai respon masalah lingkungan.

Contohnya yakni, pemerintah membuat program penanaman bakau di kawasan abrasi pantai, atau pengawasan terhadap aktivitas reboisasi bagi para pemegang HPH.

G.2 Panjang Artikel Berita

Dimensi ini melihat jumlah paragraf dalam berita yang ditulis oleh wartawan (Abrar, 1993:35). Panjang pendeknya berita menandakan penting atau tidaknya suatu peristiwa yang ditulis menjadi berita (Eriyanto, 2011:27). Kategorisasi untuk melihatnya menghitung jumlah paragraf yang terdapat dalam satu artikel berita.

G.3 Penempatan Berita

Penempatan berita dipahami sebagai operasionalisasi dalam praktek jurnalistik, berupa penempatan berita pada lokasi-lokasi strategis dan rubrikasi

tubuh surat kabar. Lokasi penempatan berita dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

- a. Halaman pertama, berita yang dimuat pada halaman utama baik berupa *headline*, maupun berita bukan *headline*.
- b. Halaman kedaerahan, berita yang dimuat dalam *scope* kedaerahan pada masing-masing surat kabar. Misalkan Kota Jogja, Bantul-Sleman, Banyumasan, Jawa Tengah.
- c. Halaman nasional, berita-berita yang dimuat pada rubrik nasional.
- d. Halaman ekonomi, berita yang dimuat di rubrik ekonomi dan bisnis.
- e. Halaman mancanegara, berita-berita luar negeri yang dimuat dalam rubrik mancanegara.
- f. Halaman kriminalitas, berita-berita kriminal dalam rubrik kriminalitas.
- g. Halaman belakang, berita yang dimuat bagian belakang pada setiap segmen surat kabar.
- h. Halaman rubrik lainnya, berita-berita yang dimuat di luar rubrik yang telah disebutkan.

G.4 Ruang Lingkup Permasalahan

Merupakan identifikasi narasumber, pihak-pihak yang terlibat isu kerusakan lingkungan hidup dalam berita yang dimuat oleh surat kabar harian. Dimensi ini untuk melihat objektivitas dan kredibilitas dalam pemberitaan.

- a. **Pemerintah**, yakni aparatur negara. Pihak yang berwenang dalam membuat dan melaksanakan kebijakan umum. Sebagai contoh yakni Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Departemen, Dinas dan Instansi milik pemerintah, Perangkat Desa.

- **Ada**, jika mencantumkan narasumber pemerintah.
- **Tidak Ada**, jika tidak mencantumkan narasumber pemerintah.

b. **Penegak hukum**, lembaga yang bertugas dalam menegakkan aturan dan perundangan yang berlaku, memiliki fungsi pengawasan. Yang termasuk di dalamnya TNI, POLRI, SatPol PP, Polisi Hutan.

- **Ada**, jika mencantumkan narasumber penegak hukum.
- **Tidak Ada**, jika tidak mencantumkan narasumber penegak hukum.

c. **Lembaga swadaya**, organisasi non profit yang bergerak pada bidang lingkungan hidup seperti Walhi, WWF, *Greenpeace*.

- **Ada**, jika mencantumkan narasumber LSM.
- **Tidak Ada**, jika tidak mencantumkan narasumber LSM.

d. **Masyarakat**, warga yang terlibat langsung sebagai subjek maupun objek dalam suatu peristiwa kerusakan lingkungan. Misalkan korban banjir, pelaku penyelundupan satwa dsb.

- **Ada**, jika mencantumkan narasumber warga masyarakat.
- **Tidak Ada**, jika tidak mencantumkan narasumber warga/masyarakat.

e. **Ilmuwan/Akademisi**, yakni teknokrat. Pihak independen dan memandang isu melalui kacamata ilmu pengetahuan sesuai kepakarannya. Mereka yang termasuk dalam ilmuwan yakni pakar, peneliti, mahasiswa, dosen, budayawan.

- **Ada**, jika mencantumkan narasumber ilmuwan / akademisi.
- **Tidak Ada**, jika tidak mencantumkan narasumber ilmuwan/akademisi.

f. **Pihak swasta/perusahaan**, yakni institusi perusahaan profit yang bersinggungan dengan masalah lingkungan. Misalkan perusahaan pemegang izin tambang golongan C, pemegang Hak Pengelolaan Hutan.

- **Ada**, jika mencantumkan narasumber Swasta/perusahaan
- **Tidak Ada**, jika tidak mencantumkan narasumber Swasta/perusahaan.

G.5 Interpretasi Permasalahan

Dimensi ini merupakan analisis pemberitaan terhadap isu kerusakan lingkungan yang terjadi. Unit analisis untuk membacanya yakni sebab, akibat, dan jenis solusi permasalahan lingkungan.

a. **Penyebab**, terjadinya suatu kerusakan lingkungan yakni karena faktor eksternal, faktor internal (Wardhana, 2004:16). Peneliti juga memasukkan faktor campuran sebagai kombinasi kedua faktor tersebut. Unit analisis ini untuk melihat bagaimana wartawan melihat komponen yang bertanggung jawab dalam suatu kerusakan lingkungan.

a.1. Faktor internal, pemberitaan kerusakan lingkungan hidup karena unsur alamiah, tanpa adanya penyebutan keterlibatan manusia.

Sebagai contoh bencana alam seperti badai, gempa bumi, satwa liar yang merusak lingkungan.

a.2. Faktor eksternal yakni kerusakan lingkungan hidup hanya disebabkan aktivitas manusia, tanpa adanya faktor alamiah. Sub kategori untuk membacanya yakni faktor warga, pemerintah atau perusahaan swasta.

a.2.1 Faktor eksternal pemerintah, yakni penyebab kerusakan lingkungan karena lemahnya pengawasan, kebijakan, dan menyoroti kinerja pemerintah terkait isu kerusakan lingkungan.

Contohnya, pemberitaan mengenai pertanggungjawaban pemerintah karena memberikan izin penambangan emas yang mencemari sungai.

a.2.2 Faktor eksternal warga, yakni penyebab kerusakan karena faktor aktivitas warga secara individu dalam mengelola lingkungan hidup.

Contohnya, pemberitaan aktivitas penambangan pasir secara ilegal atau praktek *illegal logging* oleh warga.

a.2.3 Faktor Eksternal Pihak Swasta, yakni penyebab kerusakan karena faktor kesalahan perusahaan atau lembaga profit.

Contohnya, polusi udara karena aktivitas pembakaran pabrik kayu lapis.

a.3. Faktor campuran, pemberitaan yang menyebutkan kerusakan karena kombinasi tindakan manusia dengan faktor alamiah.

Seperti tanah longsor karena curah hujan yang tinggi dan karena praktek penggundulan hutan oleh manusia.

a.4. Tanpa Penyebab Kerusakan, pemberitaan lingkungan tanpa disertakan dengan penyebutan sebab terjadinya kerusakan. Seperti berita tercemarnya air sumur warga, tanpa disertai sebab pencemaran tersebut.

b. **Dampak**, yakni efek yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan, berhubungan dengan bidang ekologis, ekonomis, sosial (Atmakusumah, 1996:63). Semakin lengkap dampak yang diberitakan, maka berita tersebut semakin mendekati kaidah jurnalisme lingkungan.

b.1. Dampak ekologis yakni dampak yang diterima langsung, mengancam kelestarian ekosistem dan ekologi lingkungan hidup. Contohnya banjir lahar dingin yang merusak kawasan DAS, atau polusi udara menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia.

- **Ada**, jika mencantumkan dampak ekologis
- **Tidak Ada**, jika tidak mencantumkan dampak ekologis.

b.2. Dampak ekonomis, pemberitaan mengenai dampak kerusakan lingkungan yang mengancam kerugian material aktivitas ekonomi manusia. Seperti kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen bagi tanaman padi petani.

- **Ada**, jika mencantumkan dampak ekonomis
- **Tidak Ada**, jika tidak mencantumkan dampak ekonomis

b.3 Dampak sosial yakni dampak yang merusak hubungan antar manusia yang terlibat dalam masalah kerusakan lingkungan. Seperti konflik dan demonstrasi penolakan warga terhadap pendirian usaha peternakan atau penambangan.

- **Ada**, jika mencantumkan dampak sosial
- **Tidak Ada**, jika tidak mencantumkan dampak sosial

b.4 Tanpa Dampak Kerusakan Lingkungan, yakni pemberitaan lingkungan namun tak disertai dengan dampak kerusakan seperti yang telah disebutkan di atas.

- **Ada**, jika tidak mencantumkan dampak kerusakan lingkungan
- **Tidak Ada**, jika mencantumkan dampak kerusakan lingkungan

c. **Muatan Dampak Kerusakan Lingkungan**, unit analisis ini untuk menghitung jumlah dampak kerusakan yang terdapat pada satu judul berita.

Kategori untuk membacanya yakni:

- **Tanpa Dampak Kerusakan**, jika berita tanpa menyebutkan dampak kerusakan.
- **1 Dampak Kerusakan**, jika berita menyebutkan 1 dampak kerusakan.
- **2 Dampak Kerusakan**, jika berita menyebutkan 2 dampak kerusakan.
- **3 Dampak Kerusakan**, jika berita menyebutkan 3 dampak kerusakan.

d. **Solusi**, yakni penyertaan upaya menyelesaikan masalah yang ditulis oleh wartawan. Pemberitaan solusi ini menandakan pemecahan masalah dan fungsi pendidikan bagi pembaca.

d.1 Preventif, yakni upaya penyelesaian suatu kerusakan lingkungan yang bersifat pencegahan sebelum kerusakan terjadi atau terulang kembali. Dalam berita terdapat penyebutan implisit nilai-nilai solusi/penyuluhan terhadap kelompok yang terlibat, pembuatan produk hukum/kebijakan serta pengawasan oleh pihak berwenang.

Seperti contoh penambangan pasir di bantaran sungai merusak DAS (Daerah Aliran Sungai), solusi preventif yakni kebijakan pembatasan izin dan moratorium penambangan pasir atau melakukan sosialisasi kepada warga untuk tidak menambang pasir di area DAS secara ilegal.

- **Ada**, jika mencantumkan solusi preventif (pencegahan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, penanggulangan).
- **Tidak Ada**, jika tidak mencantumkan solusi preventif

d.2 Represif, yakni upaya penyelesaian yang bersifat memperbaiki suatu kerusakan lingkungan yang telah terjadi melalui rehabilitasi fisik maupun melalui sanksi produk hukum. Dalam berita terdapat penyebutan implisit nilai-nilai sanksi/hukuman terhadap pelanggar aturan, rehabilitasi kondisi fisik dan hayati lingkungan yang telah rusak.

Misalkan kerusakan DAS karena penambangan pasir liar, solusi represif yakni penjeratan hukum terhadap para penambang ilegal ataupun rehabilitasi pada DAS melalui pemasangan *bronjong* batu pada tebing.

- **Ada**, jika mencantumkan solusi represif (teguran, sanksi, hukuman, perbaikan, rehabilitasi).
- **Tidak Ada**, jika tidak mencantumkan solusi represif.

d.3 Tanpa Solusi Kerusakan, yakni pemberitaan tanpa ada penyebutan penyelesaian masalah pada suatu peristiwa lingkungan. Seperti berita mengenai konflik penambangan pasir, namun tanpa disertai dengan penyelesaian masalah.

- **Ada**, jika tidak mencantumkan solusi kerusakan lingkungan.
- **Tidak Ada**, jika mencantumkan solusi kerusakan yang telah disebutkan sebelumnya.

G.6 Relevansi Berita

a. **Nilai Berita**, unit analisis ini untuk melihat sifat aplikatif berita dalam hidup sehari-hari. Untuk melihat relevansi berpedoman pada nilai berita yang ada dalam berita tersebut (Abrar, 1993:51). Semakin banyak nilai berita yang terkandung dalam suatu berita, maka semakin relevan. Kategori relevansi didefinisikan **Ada** atau **Tidak Ada** nilai berita berikut:

a.1 Penting, peristiwa lingkungan yang penting karena memiliki dampak akibat khalayak umum. Sebagai contoh, berita mengenai curah hujan tinggi di wilayah Jakarta, diprediksi akan menyebabkan banjir.

a.2 Besar, pemberitaan peristiwa lingkungan menyangkut angka-angka besar yang dapat mempengaruhi pembaca. Sebagai contoh ribuan hektar hutan lindung terbakar karena kemarau panjang.

a.3 Aktual, peristiwa kerusakan lingkungan yang diberitakan karena baru saja terjadi. Contohnya yakni peristiwa badai La Nina yang terjadi sore hari, akan segera diberitakan pada esok paginya.

a.4 Kedekatan, peristiwa kerusakan lingkungan yang diberitakan karena memiliki kedekatan geografis antara tempat terjadinya peristiwa dengan wilayah pemberitaan surat kabar. Misalkan banjir lahan dingin di sungai Opak akan memiliki kedekatan geografis dengan wilayah pemberitaan Tribun Jogja.

a.5 Ketenaran, berita yang ditulis mengandung hal-hal yang dikenal pembaca seperti orang, benda atau tempat. Seperti contoh, berita mengenai kepala daerah yang memberikan izin penambangan emas di suatu wilayah.

a.6 Human interest, peristiwa yang diberitakan karena memiliki sisi kemanusiaan. Seperti seorang anak kecil menjadi yatim piatu karena bencana tanah longsor.

b. Muatan Nilai Berita, merupakan jumlah nilai berita yang terdapat pada satu judul berita. Kategorisasi untuk membacanya dengan menghitung nilai berita:

b.1 Muatan 1 Nilai Berita, dalam satu berita terdapat 1 nilai berita.

b.2 Muatan 2 Nilai Berita, dalam satu berita terdapat 2 nilai berita.

b.3 Muatan 3 Nilai Berita, dalam satu berita terdapat 3 nilai berita.

b.4 Muatan 4 Nilai Berita, dalam satu berita terdapat 4 nilai berita.

b.5 Muatan 5 Nilai Berita, dalam satu berita terdapat 5 nilai berita.

b.6 Muatan 6 Nilai Berita, dalam satu berita terdapat 6 nilai berita.

H. Metodologi

H.1 Jenis dan Teknik Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi riset analisis isi kuantitatif untuk melihat pemberitaan mengenai isu kerusakan lingkungan hidup. Dalam melakukan penelitian ini, harus menggunakan metode secara sistematis, objektif dan kuantitatif. Sistematis berarti segala proses analisis harus tersusun melalui proses yang sistematis, objektif berarti periset harus mengesampingkan faktor-faktor yang bersifat subjektif, dan kuantitatif lebih memfokuskan pada isi komunikasi yang tampak (Kiryantono, 2012:60)

Demikian pula Eriyanto menjelaskan analisis isi kuantitatif yang dipakai untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari berita yang dilakukan secara kuantitatif (Eriyanto, 2011:412). Sedangkan desain pada penelitian analisis isi ini melihat kasus yang sama dan bagaimana komunikator yang berbeda menghasilkan isi yang berbeda dari kasus yang sama (Eriyanto, 2011: 39).

Pada penelitian ini, peneliti mengukur aspek-aspek berkaitan dengan agenda media dan jurnalisme lingkungan secara kuantitatif kemudian memfokuskan pada berita tertulis mengenai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi pada SKH

Tribun Jogja dan Kedaulatan Rakyat, sehingga akan diperoleh dua karakteristik pesan dari dua media berbeda.

H.2 Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil objek berita mengenai kerusakan lingkungan hidup yang dimuat dalam SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Tribun Jogja pada edisi 22 Mei-19 Juni 2012.

H.3 Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini, peneliti mengambil populasi berita kerusakan lingkungan hidup pada SKH Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja. Metode pengambilan sampel yakni *purposive sampling*, peneliti memilih sampel pada bulan 22 Mei–19 Juni 2012 dengan tujuan tertentu. Pemilihan ini dengan argumen pada tanggal 5 Juni merupakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, dengan asumsi pemberitaan mengenai isu lingkungan akan meningkat 2 minggu sebelum dan sesudah Hari Lingkungan.

Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 92 berita yang terdiri dari pemberitaan Kedaulatan Rakyat sebanyak 69 berita, sedangkan Tribun Jogja sebanyak 23 berita.

Pemilihan surat kabar karena prestasi SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Tribun Jogja setelah menerima penghargaan *Silver Award, The Best of Java Newspaper IPMA (Indonesia Print Media Award)* 2013. Disamping itu, Kedaulatan Rakyat pernah menerima ‘Walikota Award’ sebagai lembaga yang aktif dalam upaya pelesarian lingkungan di DIY (www.ccphi.org/, diakses 30 April 2013).

H.3 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menjadi penting untuk melihat apakah alat ukur dapat dipercaya menghasilkan temuan yang sama, ketika dilakukan oleh orang berbeda (Eriyanto, 2011:282). Peneliti memakai formula R. Holsti sebagai uji reliabilitas dimana 2 *coder*, secara bersamaan melakukan koding terhadap serangkaian isu sesuai dengan kategorisasi yang telah ditentukan oleh peneliti. Formula Holsti tersebut yakni:

$$\text{Reliabilitas} = \frac{2M}{N1 + N2}$$

M adalah jumlah jawaban yang sama pada kedua *coder* atas klasifikasi yang dibuat oleh peneliti. Sementara yang dimaksud dengan N1 adalah jumlah kasus yang dicatat oleh *coder* 1, dan N2 adalah jumlah kasus yang dicatat oleh *coder* 2. Angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0.7 atau 70% (Eriyanto, 2011:290). Sedangkan pengambilan jumlah sampel berita yang digunakan untuk uji reliabilitas menurut Neuendorf sekurangnya adalah 10% dari total populasi unit studi (Eriyanto, 2011:299).

H.5 Teknik Analisis Data

Peneliti memakai teknik tabular untuk menganalisis data penelitian. Data hasil penelitian ini akan diolah secara kuantitatif dengan cara mencatat frekuensi kemunculan pada setiap unit analisis yang telah peneliti terapkan melalui *coding sheet*. Data hasil lembar koding akan disusun ke dalam tabel frekuensi dan disajikan dalam grafik lalu dianalisis berdasarkan frekuensi kemunculan.

Penelitian ini tak bertujuan untuk membandingkan kedua surat kabar, hal ini karena penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Terdapat beberapa alasan, pertama karena kedua surat kabar memiliki kemiripan sebagai surat kabar yang berprestasi dalam pemberitaan jurnalisme lingkungan. Kedua karena jumlah sampel penelitian yang terpaut jauh, menyebabkan tak proporsional bila dilakukan perbandingan. Sehingga pada intepretasi data pada masing-masing surat kabar lokal dengan melakukan analisis deskriptif.